

PELAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEOLOGI PEMBEBASAN

Evi Rusdiana Tanujaya
Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika
evitanujaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi hubungan pelaporan keuangan terhadap keadilan sosial di Indonesia melalui perspektif teologi pembebasan. Keadilan sosial membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk dapat mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Teologi pembebasan merupakan teori yang membantu untuk membebaskan masyarakat miskin dan tertindas yang dapat diaplikasikan pada penyusunan pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada pengaruh antara pelaporan keuangan dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan dilandasi teologi pembebasan, maka pelaporan keuangan dapat menyajikan pelaporan yang wajar. Akuntabilitas juga sangat mutlak bagi profesi akuntan guna menyusun pelaporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode explanatory dengan bentuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan pelaporan keuangan di Indonesia masih belum baik dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Keywords: Teologi Pembebasan, Keadilan Sosial, Pelaporan Keuangan, dan Akuntabilitas

This study aims to criticize the correlation of financial reporting toward social justice in Indonesia through liberation theology perspective. Social justice helps to improve society prosperity in Indonesia. Financial reporting provide useful information that helps to make decision and achieving goals. Liberation Theology helps liberate the poor and the downtrodden which is can applied for making financial reporting.

Based on research result, there is influence between financial reporting and social justice in Indonesia. With liberation theology on it, financial reporting can provide proper reporting. Accountability it's absolute for accountants which is useful for making financial reporting in accordance with applicable regulations. Method used was explanatory with format qualitative research. Data collection technique are interview and analysis document. Based on research result, preparation financial reporting in Indonesia is bad enough yet and create injustice for the society.

Keywords: Liberation Theology, Social Justice, Financial Reporting, and Accountability

PENDAHULUAN

Akuntansi selama ini hanya dipandang sebagai suatu profesi yang menyediakan informasi berupa laporan keuangan baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Padahal, akuntansi berpotensi untuk membantu kaum yang terpinggirkan berespondan dengan wawasan dari kritik teologis yang berfokus pada kemiskinan ekonomi. (Gallhofer dan Haslam, 2003).

Dalam peraturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pasal 71 ayat (1) berisi:

“Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.” (RUPS, 2007).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila perusahaan mendapatkan laba, perusahaan tidak hanya membagi pada para pemegang saham dan anggota direksi dan komisaris, tetapi juga pada karyawan. Dengan begitu kesejahteraan karyawan ikut meningkat. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras agar perusahaan mendapatkan laba bersih lebih tinggi lagi di periode berikutnya.

Dalam UU No. 40 pasal 74 ayat (1) dan (2) mengenai perseroan terbatas berisi :

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” (UU No. 40, 2007).

Emiten dan Perusahaan Publik harus mengakui pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai beban dalam periode berjalan yaitu pada saat terjadinya dan bukan sebagai distribusi laba bersih. (BAS No.8, 2009).

Jika dilihat dari RUPS dan UU yang telah dijabarkan sebelumnya, sangat tidak sepadan dengan tingkat kemiskinan yang setiap tahun masih terus meningkat. Data dari bps.go.id menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada maret 2015 mencapai 28,59 juta orang, atau sekitar 11.22% dari penduduk Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,86 juta orang atau sekitar 0,26% dari september 2014. Jika benar RUPS dan UU tersebut dipatuhi dan dijalankan dengan baik, seharusnya tingkat kemiskinan di Indonesia dapat mengalami penurunan setiap tahun.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan sejatinya turut mengambil peran dalam keadilan sosial di Indonesia. Namun, dalam PSAK No.1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian tanggungjawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa: ”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. CSR masuk dalam pelaporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Oleh karena itu CSR saja tidak cukup untuk membuktikan berpengaruh atau tidaknya kepada keadilan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan pelaporan keuangan dengan keadilan sosial melalui teologi pembebasan. Saphiro (2009), pendidikan teologi dalam profesi akuntansi memungkinkan untuk berpikir kritis, etis, dan

spiritual tentang diri mereka sendiri, profesi dan masyarakat di sekitarnya. Teologi membantu akuntan untuk dapat menyusun pelaporan keuangan yang sewajarnya dan transparan, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri namun juga untuk dampak masyarakat.

Penelitian Moerman (2006), menunjukkan bahwa akuntansi dengan konsep atau wawasan teologi mempunyai potensial untuk memberikan informasi yang dapat membantu emansipasi. Perspektif teologi dapat digunakan untuk mengkritisi akuntansi sebagai sebuah pengertian pembebasan dari sudut pandang moral yang memiliki kewenangan dalam firman Tuhan. Menurut Mckernan dan Kosmala (2007), tanggungjawab pada agama memiliki keterkaitan dengan permintaan agar akuntansi bersikap adil. Selain itu hubungan antara keadilan dan hukum dapat diaplikasikan secara jelas pada pelaporan keuangan. Dengan tanggungjawab tersebut akan ada tuntutan bagi pofesi akuntan untuk menyusun pelaporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku guna menciptakan keadilan sosial bagi sekitar. Akuntansi juga sebagai suatu potensi untuk membantu kaum terpinggirkan dengan menggunakan wawasan dari kritik teologis yang berfokus pada kaum yang miskin secara ekonomi (Gallhofer & Haslam, 2003).

Namun sangat bertentangan dengan prinsip bahwa pelaporan keuangan dapat menciptakan keadilan sosial melalui teologi pembebasan, Scoot (2000) menyatakan kegiatan manajemen laba dapat digunakan oleh akuntan dalam pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan khusus. Manajemen laba hanya menguntungkan perusahaan tetapi merugikan pihak-pihak eksternal. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dari Gustavo Guitierezz sebelumnya.

Kam (1990) berpendapat bahwa selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori untuk akuntansi lahir hanya dari konteks budaya dan ideologi. Tidak terkandung unsur agama dalam akuntansi. Murni hanya budaya dan ideologi. Sebanding dengan Carlett (1962) mengklaim bahwa akuntansi diciptakan dan

dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan dari kelompok-kelompok tertentu. Bukan berdasarkan hukum yang fundamental atau prinsip-prinsip yang absolut. Karena itu sampai saat ini pelaporan keuangan yang disusun oleh para akuntan hanya untuk memuaskan keinginan para pengguna pelaporan keuangan tertentu.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa ada pertentangan antara peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti berpendapat setuju bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan berpengaruh pada keadilan sosial terutama jika dilandasi dengan agama. Beberapa peneliti lain menyebutkan akuntansi dan pelaporan keuangan hanya berdasarkan budaya dan ideologi yang pada akhirnya hanya disusun untuk memenuhi keinginan pihak-pihak tertentu tanpa memikirkan dampaknya pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan basic research karena penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi atau mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu teori baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkritisi hubungan pelaporan keuangan terhadap keadilan sosial di Indonesia dari perspektif teologi pembebasan. Proses pengumpulan data diperoleh langsung dari lapangan (field researcch), meliputi 2 metode yaitu wawancara (semi structured), dan analisi dokumen.

Desain studi bertujuan untuk menjelaskan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan mini research question dan mendeskripsikan apa saja yang berhubungan dengan mini research question, antara lain sumber data, metode dan pengumpulan data, aspek-aspek praktis dan justifikasi. Agar tercapainya tujuan yang diinginkan dari penelitian ini maka dapat dijelaskan dalam main research question sebagai berikut: Sejauh mana kritik dari teologi pembebasan melalui akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dapat mendorong terciptanya keadilan sosial di Indonesia? Main research question yang telah dibuat untuk tercapainya tujuan tersebut, diuraikan dalam bentuk yang lebih berfokus pada keadilan sosial yang masih lemah di Indonesia. Berikut ini penjelasan mini research question dan pengambilan

data dan pengelolaan yang berfungsi untuk mengkritisi hubungan antara pelaporan keuangan dengan keadilan sosial melalui perpektif teologi pembebasan, dan pengambilan data untuk mengolah:

1. Bagaimana peranan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam menciptakan akuntabilitas publik?

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan ini didapatkan dengan melakukan wawancara. Metode wawancara yang dilakukan adalah semi structured. Wawancara dilakukan dengan akuntan yang tergabung dalam IAI. Wawancara dilakukan langsung selama kurang lebih 20 menit sebanyak 2 kali dengan media alat tulis dan voice recorder. Penggunaan voice recorder dapat meminimalkan kemungkinan terlewatnya hal-hal penting yang disampaikan oleh manajer operasional dan karyawan. Dokumentasi dimaksudkan agar dapat mengetahui definisi akuntabilitas menurut IAI dan untuk mengetahui peranan IAI dalam akuntabilitas publik. Sumber data lain yang digunakan adalah analisis dokumen yang didapatkan dari website resmi IAI yaitu IAIglobal.go.id dan artikel-artikel online lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program kerja IAI untuk menciptakan akuntabilitas publik benar-benar direalisasikan atau tidak.

2. Bagaimana persepsi akuntan tentang makna akuntabilitas dalam pelaporan keuangan?

Pertanyaan mini research question kedua ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana akuntan mengerti makna akuntabilitas dan bagaimana akuntan menganggap penting akuntabilitas, khususnya dalam menyusun pelaporan keuangan. Sumber data yang digunakan untuk memperoleh jawaban adalah metode wawancara semi sturcured, yang dilakukan kurang lebih dalam waktu 1 jam 30 menit sebanyak 9 kali dengan waktu masing-masing sekitar 10 menit. Media yang digunakan adalah voice recorder dan alat tulis. Penggunaan voice recorder digunakan untuk meminimalkan kemungkinan terlewatnya hal-hal penting yang tidak sempat tercatat saat wawancara.

Penggunaan alat tulis digunakan untuk meminimalkan kemungkinan suara yang kurang jelas dari voice recorder.

3. Bagaimana keterkaitan akuntabilitas, pelaporan keuangan dan keadilan sosial? Menjawab mini research question ini, dilakukan wawancara dengan metode semi structured yang dilakukan pada akuntan perusahaan di Surabaya. Media yang digunakan adalah voice recorder dan catatan tertulis. Waktu wawancara kurang lebih 1 jam 30 menit yang dilakukan sebanyak 9 kali dengan masing-masing waktu 10 menit. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah akuntan melalui pelaporan keuangan yang disusunnya dapat mempengaruhi keadilan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan Profesional yang diakui memiliki visi untuk menjadi organisasi profesional terkemuka dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, dan lingkungan dalam perspektif nasional dan internasional. (www.iaiglobal.or.id)

IAI memiliki kewajiban untuk meningkatkan peran profesi akuntansi dalam perekonomian, serta untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme akuntan. Ini adalah suatu kebutuhan bagi akuntan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dan pengetahuan dalam dunia bisnis yang semakin terhubung hari ini. Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Dwi Setiawan (2015) mengatakan bahwa profesi akuntan harus senantiasa mengedepankan akuntabilitas sehingga diharapkan dapat ditularkan ke seluruh elemen masyarakat. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kinerja dan pelayanan publik. Tak hanya di entitas pemerintahan tapi juga di entitas bisnis. Menurutnya, penerapan akuntabilitas publik yang maksimal akan memberikan banyak keuntungan. (www.iaiglobal.or.id)

Jadi, sebagai organisasi profesional, IAI harus mampu membina anggotanya dan harus mampu mengawasi dan menindak anggotanya yang melanggar kode etik

profesi. Tugas dan kewajiban IAI dalam hal ini memang tidak mudah tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Banyak lembaga-lembaga lain yang terlibat, seperti LSM, dan lembaga keagamaan, terbatas pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan yang paling sederhana sekalipun. Organisasi IAI dapat membantu mereka dengan memberikan pengetahuan praktis atau jika memungkinkan memberikan bantuan sumberdaya manusia. Selanjutnya jika dimungkinkan IAI dapat menyusun petunjuk praktis pengetahuan laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan bagi organisasi masyarakat di tingkat paling bawah seperti RT dan RW.

Tidak hanya itu, IAI juga mendukung akuntabilitas dalam akuntan publik, yaitu dengan adanya kode etik perwujudan dari adanya kode etik merupakan bukti pencapaian IAI dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Indonesia, khususnya untuk akuntan publik. Dengan adanya kode etik, maka akuntan publik dapat menjadikannya sebagai bentuk akuntabilitas dalam pekerjaannya.

Dikutip dari www.iaiglobal.or.id, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki program kerja sebagai berikut:

1. Melanjutkan Program Konvergensi IFRS

Implementasi program konvergensi IFRS 2012 yang telah dicanangkan IAI harus dilanjutkan dengan mendapat dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik. Dukungan dan kerjasama secara nasional dari seluruh pemangku kepentingan masih perlu dioptimalkan.

2. Implementasi SAK ETAP

Komitmen IAI untuk mendukung pengembangan sektor UKM perlu ditindaklanjuti dengan rencana strategis sosialisasi dan implementasi SAK ETAP yang telah diterbitkan IAI. Juga perlu diwujudkan kerjasama dengan berbagai pihak misal dengan Kementerian terkait, Kadin, Perguruan Tinggi, Bank Indonesia, atau asosiasi lain yang relevan.

Perlu diselenggarakan pilot project penerapan SAK ETAP seutuhnya bekerjasama dengan mitra kerja yang terkait sehingga SAK ETAP dapat segera tersebar implementasinya ke seluruh Indonesia. Pembentukan Tim Implementasi SAK ETAP seperti tim Implementasi IFRS perlu dipertimbangkan.

3. Terus Memperjuangkan Landasan Hukum Profesi Akuntansi

IAI perlu menyikapi secara resmi RUU Akuntan Publik yang sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Khusus terkait RUU Pelaporan Keuangan, IAI telah dilibatkan sebagai anggota tim penyusun RUU Pelaporan Keuangan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Draft naskah akademik yang telah disusun perlu dikaji kembali untuk segera difinalisasi dan disampaikan kepada pemerintah. Dengan adanya landasan hukum ini diharapkan nantinya profesi kita dapat semakin tertata baik, tumbuh dan berkembang.

4. Pembentukan IAI Wilayah di 33 Propinsi Memperkuat Struktur Pendanaan IAI

IAI diharapkan dapat memperkuat struktur pendanaan kegiatannya sehingga program kerja yang disusun dapat berjalan dengan lebih baik dan semakin berkembang. Kegiatan IAI agar dapat diupayakan mendapatkan bantuan grant, dan pengumpulan dana abadi dari berbagai sumber.

IAI sangat menjunjung tinggi adanya akuntabilitas pada setiap pelaporan keuangan, sekalipun pada perusahaan swasta yang tidak berhubungan dengan negara secara langsung. Dengan adanya SAK-ETAP, IAI mendukung setiap elemen untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar, sehingga dapat membantu perusahaan untuk terus berkembang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dari akuntan perusahaan, agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.

IAI ingin menciptakan akuntabilitas publik pada semua sektor publik dan mencoba menjangkau sektor swasta. Akuntabilitas yang ingin diterapkan IAI untuk seluruh akuntan di Indonesia adalah sebuah tanggungjawab untuk dapat menyajikan pelaporan keuangan sewajarnya dan bekerja sesuai kode etik, terutama akuntan yang membuat pelaporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal

Secara keseluruhan, IAI memang mendukung terciptanya akuntabilitas publik di Indonesia. Semua yang direncanakan IAI untuk mendukung akuntabilitas pada akuntan di Indonesia sudah dipenuhi. Hanya saja, seperti yang kita ketahui, banyak akuntan yang tidak bekerja sesuai kode etik profesi. Tidak mustahil bagi akuntan di Indonesia untuk memanipulasi pelaporan keuangan mereka. Disinilah IAI masih kurang tegas menyikapi akuntan yang tidak menggunakan prinsip akuntabilitas tersebut. Seharusnya IAI bekerjasama dengan pemerintah untuk menindak tegas akuntan yang tidak bertanggungjawab dalam membuat pelaporan keuangan, bukan hanya fokus pada pembaharuan, seminar, atau sejenisnya.

Sebagian besar akuntan di Surabaya beranggapan bahwa pelaporan keuangan dan laporan keuangan sama. Padahal menurut Wild, Shaw&Chiappetta(2009), pelaporan keuangan merupakan komunikasi informasi keuangan yang berfungsi untuk melakukan investasi, kredit dan keputusan bisnis lainnya. Masih banyak akuntan yang selama ini beranggapan tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan, selain itu istilah pelaporan keuangan masih asing bagi mereka. Jika dilihat fungsinya, memang laporan keuangan dan pelaporan keuangan memiliki fungsi yang sama, namun pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas.

Belum banyak akuntan perusahaan mengetahui perbedaan antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan. Laporan keuangan menurut mereka adalah laporan kondisi perusahaan secara *financial* yang dibuat setiap periode tertentu, yang dapat memberikan informasi untuk dapat mengambil keputusan dimasa mendatang, bahkan tak jarang yang menganggap pelaporan keuangan hanya sekedar aktivitas melaporkan laporan keuangan yang telah dibuat. Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan

perusahaan yang ditambahkan dengan laporan-laporan lain yang juga dibuat selama satu periode tertentu.

Akuntabilitas adalah sebuah tanggungjawab yang harus dimiliki oleh seluruh akuntan di Indonesia, tentunya akuntan tidak asing lagi dengan istilah ini. Setiap akuntan yang telah diwawancarai dan sesuai dugaan akan selalu menjawab bahwa mereka telah menerapkan prinsip akuntabilitas atau telah bertanggungjawab penuh terhadap hasil pelaporan keuangannya. Perusahaan yang memiliki akuntan yang bertanggungjawab atau memegang prinsip akuntabilitas umumnya perusahaan yang bertahan cukup lama.

Dari apa yang telah diungkapkan para akuntan, akuntabilitas sangat penting untuk pelaporan keuangan dan memiliki peran besar bagi kegiatan operasional perusahaan. Melalui pelaporan keuangan akuntan dapat membaca kondisi perusahaan saat itu, dan dapat membuat perencanaan untuk selanjutnya, sehingga perusahaan akan tetap bertahan bahkan terus berkembang.

Akuntan dan akuntabilitas sangat berkaitan satu sama lain, logikanya akuntan harus bertanggungjawab penuh terhadap pelaporan keuangan yang telah dibuatnya. Apabila benar akuntan memegang teguh prinsip akuntabilitas, maka seharusnya kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Mayoritas para akuntan setuju dan berpendapat bahwa akuntabilitas dan pelaporan keuangan memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa seharusnya pelaporan keuangan memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi perusahaan saling berkaitan dengan kesejahteraan karyawannya

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mendukung adanya akuntabilitas publik oleh para akuntan di Indonesia. IAI telah melakukan berbagai usaha, antara lain dengan menyelenggarakan seminar-seminar dan menerapkan SAK-ETAP. Tidak hanya itu, IAI juga mulai mendorong perangkat desa untuk transparan dan bertanggungjawab atas dana desa, hal ini merupakan bukti bahwa IAI mendukung penuh akuntabilitas bisa diterapkan secara benar di Indonesia. Namun IAI juga harus

terus memantau akuntan-akuntan di Indonesia, agar akuntabilitas tidak hanya sekedar teori tetapi harus diterapkan.

Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Dwi Setiawan (2015) mengatakan bahwa profesi akuntan harus senantiasa mengedepankan akuntabilitas sehingga diharapkan dapat ditularkan ke seluruh elemen masyarakat. IAI merasa memiliki kewajiban untuk meningkatkan profesi akuntansi serta kualitas akuntan Indonesia.

Dilihat dari hasil wawancara, akuntan di Indonesia mengerti betul apa itu akuntabilitas, mereka mengerti pentingnya menerapkan akuntabilitas dalam menyusun pelaporan keuangan perusahaan. Mereka sadar bahwa pelaporan keuangan yang telah disusun harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntan-akuntan tersebut mengakui pelaporan keuangan sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas. Hal itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan mereka.

Bentuk dari tanggungjawab mereka adalah memberikan informasi keuangan perusahaan periode tersebut, menyajikan laporan keuangan atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, memberikan saran yang meningkatkan pertumbuhan perusahaan, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Akuntan-akuntan tersebut yakin, apabila mampu melakukan hal tersebut, maka itu merupakan bukti bahwa mereka telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang telah mereka buat. Jika akuntan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas, maka akan membuat kondisi perusahaan semakin buruk.

Akuntabilitas versi akuntan dan versi IAI secara keseluruhan hampir sama. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan IAI dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas publik di Indonesia telah diketahui akuntan-akuntan perusahaan, sekalipun mereka bukan anggota IAI.

Akuntan di Indonesia juga mengakui adanya hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan pelaporan keuangan suatu perusahaan. Mereka meyakini bahwa sebuah perusahaan yang sejahtera secara pelaporan keuangan maka seluruh bagian dalam perusahaan tersebut akan ikut sejahtera tanpa pengecualian. Oleh karena itu,

ada hubungan yang erat antara pelaporan keuangan dengan setiap entitas yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Menurut bps.go.id tingkat kemiskinan di Indonesia pada maret 2015 mencapai 28,59 juta orang, atau sekitar 11.22% dari penduduk Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,86 juta orang atau sekitar 0,26% dari september 2014.

Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti belum ada keadilan sosial yang menjangkau masyarakat Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan susah individu untuk mendapatkan kerja serta upah yang layak. Merekapun tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka disebabkan oleh kemiskinan.

2. Pengangguran

Tingginya tingkat masyarakat Indonesia yang belum bekerja. Hal ini disebabkan individu mereka sendiri, seperti malas, tidak adanya lapangan pekerjaan dan kurangnya keinginan untuk berwirausaha. Lapangan pekerjaan dapat diciptakan apabila masyarakat Indonesia berani berwirausaha. Selain itu, perluasan usaha suatu perusahaan juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi juga turut menyumbang pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia. Menurut bps.go.id angkatan kerja Indonesia sampai Februari 2015 meningkat hingga 6,4 juta orang menjadi 128,3 juta orang. Namun, pada Agustus 2015 perekonomian Indonesia mulai melemah, sehingga mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan, yang menyebabkan sekitar 26.000 karyawan di PHK. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukannya karena menderita kerugian yang cukup besar.

Sesuai dengan sila kelima yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara ini sendiri juga mendukung terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun tetap masyarakat lah yang berperan penting dalam mewujudkan sila tersebut.

Melihat tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang telah dibahas sebelumnya, merupakan salah satu bukti bahwa masih kurangnya keadilan sosial di Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, serta tidak adanya kesejahteraan masyarakat.

Keadilan sosial di Indonesia masih lebih berpihak pada golongan tertentu atau dengan kata lain belum tersebar secara merata. Pada saat ini, mayoritas tidak berorientasi pada kepentingan publik, hanya kepentingan yang sekiranya menguntungkan secara pribadi. Ini merupakan masalah terbesar saat ini dan masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Banyaknya perusahaan yang berkembang dan mengalami pertumbuhan di Indonesia seharusnya disertai dengan kesejahteraan pihak internal maupun eksternal perusahaan tersebut. Dalam pandangan Ikatan Akutansi Indonesia sendiri sebenarnya juga mendukung adanya keadilan sosial di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya dengan menyarankan transparansi pada pelaporan keuangan, sehingga semua pihak benar-benar mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Namun, sekali lagi jika hanya melihat dari sudut pandang definisi akuntabilitas menurut IAI, maka sedikit kurang relevan, sebab IAI hanya mewajibkan untuk menyusun dan melaporkan pelaporan keuangan, yang berarti bukan masalah apabila terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan tersebut. Jika hanya mengacu pada definisi akuntabilitas itu, maka tentu keadilan sosial dalam perusahaan tidak akan terjadi. Akuntan hanya merasa tanggungjawabnya hanya sebatas menyusun dan melaporkan.

Teologi pembebasan lahir sebagai respon terhadap situasi ekonomi dan politik yang dianggap menyengsarakan rakyat. Teologi ini sangat erat dengan keadilan sosial yang mengajarkan bahwa setiap orang berhak diperlakukan adil. Teori-teori teologi

pembebasan yang disampaikan oleh para ahli sangat berhubungan dan menjunjung tinggi keadilan sosial pada masyarakat yang tertindas atau untuk saat ini lebih tepat disebut masyarakat yang diperlakukan tidak adil.

Menurut Gutierrez (1973) teologi pembebasan tidak hanya bebas dari kemiskinan melainkan juga adanya transformasi. Banyak perusahaan di Indonesia yang memperlakukan karyawan/buruh dengan tidak adil. Perusahaan tersebut terus mengalami pertumbuhan, tapi tidak dengan karyawan-karyawannya. Seharusnya, perusahaan yang mengalami pertumbuhan dengan kenaikan profit secara terus menerus maka diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan karyawan-karyawannya.

Tidak hanya karyawan, tetapi banyak masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial. Contohnya Freeport, tambang yang berada di Papua ini memiliki sumber daya alam yang luas, namun kehidupan masyarakat Papua masih jauh dibawah kota-kota lain di Indonesia. Disini biaya CSR berperan, namun kenyataannya biaya tersebut tidak jelas dan tidak terealisasi. Ini merupakan contoh tidak adanya keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan sumber daya alam yang melimpah seharusnya masyarakat Papua ikut merasakan dampaknya, yaitu mengalami pertumbuhan yang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan.

Selama ini, masyarakat Indonesia merasa diperlakukan tidak adil karena adanya manipulasi dalam pelaporan keuangan yang hanya mementingkan pihak-pihak tertentu, sehingga dana atau uang yang seharusnya dialirkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan tidak tersalurkan. Hal ini yang kemudian dirasa tidak adil. Tidak hanya karena lemahnya hukum di Indonesia, tetapi juga karena akuntan yang tidak lagi bekerja sesuai kode etik dan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas.

Pelaporan keuangan merupakan bagian akhir dalam proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi pemakai, maka pelaporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan pada periode tersebut. Oleh karena itu, seorang akuntan dipercaya sebagai penyaji kondisi perusahaan yang sebenarnya untuk nantinya dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Akuntan memegang kendali atau peran penting. Seorang akuntan otomatis

harus mengikuti perkembangan standar akuntansi yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Akuntan yang melakukan kecurangan tentu merugikan beberapa pihak. Informasi atau pernyataan yang salah dapat ditujukan lebih kepada pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor atau bahkan masyarakat dengan cara menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, penerapan dana yang salah atau bahkan pencurian, serta untuk menutupi penggunaan aset-aset diluar operasional perusahaan.

Akuntansi merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Informasi yang disampaikan oleh akuntansi tadi dapat berpengaruh pada perilaku penggunanya. Interaksi antara akuntansi dan pengguna ini faktanya dapat dilihat pada kehidupan suatu perusahaan atau organisasi sehari-hari, termasuk kasus manipulasi informasi akuntansi yang pernah terjadi di Amerika yang melibatkan beberapa perusahaan besar seperti Enron dan Xerox. Oleh karena itu, akuntan juga berperan penting untuk menghindari manipulasi pelaporan keuangan, karena akuntan adalah pembuat pelaporan keuangan. Kecurangan yang dilakukan akuntan ini merupakan bukti adanya kelemahan prosedur, pengawasan atau hukum di Indonesia. Sistem pengendalian intern yang lemah sangat mungkin dimanfaatkan akuntan yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan.

Sistem akuntansi melibatkan individu dan tatanan sosial, karena itu sistem akuntansi yang berkeadilan membutuhkan timbal balik dengan sistem keadilan sosial agar pengembangan sistem akuntansi yang tepat bisa tercapai, sehingga penyampaian informasi akuntansi yang disampaikan bisa jujur, adil dan bisa di terima semua pengguna informasi akuntansi tanpa menimbulkan keresahan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut Rusni (2011) terdapat berbagai cara agar akuntabilitas sendiri dapat dijamin untuk benar-benar dapat mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nir massa, maupun media komunikasi lainnya.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara untuk mencapai program yang telah direncanakan.
3. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan adanya mekanisme pengaduan masyarakat.
4. Ketersediaan informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Pembuatan pelaporan keuangan adalah suatu kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi transparan. Sesuai dengan akuntabilitas yang mendukung keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Transparansi informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Akuntan berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial melalui akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Profesi akuntan harus dilindungi oleh hukum yang kuat serta adanya pengawasan yang ketat, sehingga terhindar dari ancaman-ancaman pihak tertentu yang mengharapkan pelaporan keuangan dimanipulasi. Tidak hanya itu, akuntan yang tertangkap melakukan manipulasi atau semacamnya juga harus diberi sanksi yang berat, mengingat tanggungjawabnya yang sangat besar.

Akuntan juga harus dilindungi oleh hukum yang kuat untuk mendukung prinsip akuntabilitas, mengingat banyaknya oknum-oknum tertentu yang sengaja mengancam akuntan untuk membuat pelaporan keuangan yang tentunya tidak sesuai dengan kode etik profesi akuntan. Hal ini menghindari menurunnya kesejahteraan masyarakat Indonesia karena telah diperlakukan tidak adil. Apabila akuntan telah dilindungi oleh hukum dan menggunakan prinsip akuntabilitas baik dalam membuat pelaporan keuangan atau dalam melakukan audit, maka akan terjadi keadilan sosial pada masyarakat Indonesia. Hal itu karena selama ini masyarakat Indonesia diperlakukan tidak adil karena pihak-pihak tertentu.

Akuntabilitas versi IAI maupun versi akuntan perusahaan sebenarnya sama, hanya saja akuntabilitas versi IAI kurang detail yang dapat menyebabkan beberapa orang memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat curang, sehingga tingkat kemiskinan

di Indonesia akan terus meningkat dan menyebabkan tidak adanya keadilan sosial. Namun dalam prakteknya IAI mendukung transparansi dan akuntan bekerja sesuai dengan kode etik untuk dapat menciptakan keadilan sosial di Indonesia.

Jadi akuntabilitas, pelaporan keuangan dan keadilan sosial saling berhubungan. Masalah kurang sejahterahnya masyarakat di Indonesia dapat diatasi dengan adanya akuntan yang menggunakan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang dibuatnya. Pelaporan keuangan yang disajikan sewajarnya membantu memonitoring aliran dana yang dikeluarkan serta mendeteksi kecurangan yang ada, sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan perlindungan hukum yang kuat dan sanksi tegas pada akuntan-akuntan di Indonesia yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum untuk melindungi akuntan yang diancam oleh pihak tertentu untuk dipaksa menyusun pelaporan keuangan yang tidak sewajarnya untuk menguntungkan pihak tersebut. Sanksi tegas diperlukan untuk menanamkan efek jera pada akuntan-akuntan yang curang, sehingga diharapkan akuntan-akuntan tidak akan lagi berani untuk bertindak curang dalam menyusun pelaporan keuangan. Sanksi tersebut bisa mulai dari teguran hingga dilepasnya profesi atau gelar mereka.

Untuk perbedaan definisi akuntabilitas menurut IAI dan akuntan-akuntan perusahaan, sebaiknya dijelaskan ulang. Akuntabilitas versi akuntan perusahaan lebih rinci dan jelas. Sebaiknya IAI pun memperjelas definisi akuntabilitasnya, sehingga akuntan-akuntan di Indonesia jelas bahwa akuntabilitas tidak hanya sekedar membuat pelaporan keuangan dan menyampaikan informasi. Hal ini agar tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu yang bermaksud melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan yang nantinya berimbas pada masyarakat.

IAI perlu mengkaji ulang definisi dari akuntabilitas, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam penyusunan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artielsiana. 2015. Pengertian Keadilan dan Macam-Macam Keadilan, (online) (www.artikelsiana.com, diakses 11 Desember 2015)

Diatmika, Bayu. 2012. Perbedaan Financial Statement dan Financial Reporting, (online) (www.diatmika.com, diakses 3 September 2015)

Gallhofer & Haslam. 2003. Accounting and Liberation Theology: Some Insights For The Project of Emancipatory Accounting, (online) (www.sciencedirect.com, diakses 9 Oktober 2015)

Gutierrez, Gustavo. 1973. A Theology of Liberation. Orbis Books:New York

Haris, Rusni. 2013. Hubungan Akuntabilitas dan Good Governance, (online) (www.academia.edu, diakses 16 Maret 2016)

Kam, Venom. 1990. Accounting Theory. second edition. new york: john wiley & sons

Khoiruzahni, Yossi. 2009. Keadilan Dalam Akuntansi, (online) (www.dokumen.tips/documents/keadilan-akuntansi.html, diakses 9 Mei 2016)

Keuangan LSM. 2015. Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1994, (online) (www.keuanganLSM.com, diakses 5 September 2015)

Linnemann. Eta. 1991. Teologi Kontemporer, Ilmu atau Praduga. Malang:Departemen Literatur Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia

Lowy, Michael. 2000. Teologi Pembebasan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset

Ludigdo, Unti. 2013. Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan, (online) (www.accounting.feb.ub.ac.id, diakses 22 Oktober 2015)

Martha. 2014. Transparansi dan Akuntabilitas, (online) (www.repository.widyatama.ac.id, diakses 9 April 2016)

Mckernan, Kosmala. 2007. Doing the truth: religion – deconstruction – justice, and accounting, (online) (www.emeraldinsight.com, diakses 9 Oktober 2015)

Moerman, Lee. 2006. People as Prophets: Liberation Theology as a Radical Perspective on Accounting, (online) (www.emerlad.com, diakses 2 Oktober 2015)

Paksi. 2015. Peran IAI Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa, (online) (www.academia.edu/10618559, diakses 3 September 2015)

Scott, William. 1997. *Financial Accounting Theory*. USA: Prentice Hall International, Inc.

Setiawan, Parta. 2015. 10 Pengertian Keadilan dan Jenisnya Menurut Para Ahli, (online) (www.gurupendidikan.com, diakses 11 Desember 2015)

Tesis Disertasi. 2013. Teori Akuntansi Tujuan Pelaporan Keuangan, (online)
(www.tesisdisertasi.blogspot.co.id, diakses 15 April 2016)

Vinten, Gerald. 2006. Accountants, Economists and Needles, (online)
(www.web.usm.my/journal/aamjaf.com, diakses 17 mei 2016)

Warfield, Weygandt, Kieso. 2011. Intermediate Accounting, Volume. New
York: John Wiley&Sons.

Wild, Shaw & Chiappetta. 2009. Fundamental Accounting Principles. New
York: Mc Graw-Hill Irwin

Yadiati, Winwin. 2007. Teori Pengantar-Suatu Pengantar, (online)
(www.tesisdisertasi.blogspot.co.id, diakses 16 September 2015)